



Peran Notaris Dalam Pembubaran Perusahaan Karena Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Pekerja

Muhammad Ridho Andrian Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Edomkn22@gmail.com

Abstrak

Proses pembubaran perusahaan karena kepailitan memunculkan tantangan serius terkait perlindungan hak pekerja. Notaris berperan dalam melindungi hak-hak pekerja untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku selama proses kepailitan. Hasil dari penelitian ini adalah Peran notaris dalam proses pembubaran perusahaan karena pailit adalah memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan pembubaran disusun dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, mulai dari pengecekan status hukum dan persiapan awal, penyusunan dan pengesahan akta pembubaran, hingga pelaporan kepada instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bentuk perlindungan hak pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk diaudit atau peninjauan kembali atas keuangan perusahaan yang mengalami pembubaran, hak untuk mengajukan klaim (gaji, tunjangan, kompensasi), hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas privasi dan keamanan informasi.

Kata kunci: Notaris, Pailit, Hak Pekerja

Abstract

The process of dissolving a company due to bankruptcy raises serious challenges regarding the protection of workers' rights. Notaries play a role in protecting workers' rights to obtain their rights in accordance with applicable regulations during the bankruptcy process. The results of this research are that the role of a notary in the process of dissolving a company due to bankruptcy is to ensure that all documents related to the dissolution are prepared and verified in accordance with legal provisions, starting from checking the legal status and initial preparations, drafting and ratifying the dissolution deed, to reporting to the relevant agencies, such as the Ministry of Law and Human Rights and the Directorate General of Taxes. Apart from that, forms of protecting workers' rights in companies that are declared bankrupt include obtaining clear information, the right to be audited or review the finances of a company that has experienced dissolution, the right to submit claims (salary, benefits, compensation), the right to fair treatment, and the right to privacy and information security.

Keywords: Notary, Bankruptcy, Workers' Rights

PENDAHULUAN .

Kepailitan atau pailit, adalah kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditor. Proses kepailitan melibatkan pengakuan resmi oleh pengadilan bahwa perusahaan tersebut berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya. Kepailitan sering kali disebabkan oleh manajemen yang tidak efektif, beban utang yang terlalu besar, penurunan drastis dalam permintaan pasar, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.



Proses hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pailit oleh kreditur atau oleh perusahaan itu sendiri. Setelah permohonan diterima, pengadilan niaga akan mengadakan sidang untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut benar-benar berada dalam keadaan pailit. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan menunjuk kurator untuk mengelola aset perusahaan yang pailit dan melaksanakan proses likuidasi. Kurator memiliki tugas untuk menginventarisasi aset dan kewajiban perusahaan, menjual aset-aset yang dimiliki, serta mendistribusikan hasil penjualan kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan. Prioritas pembayaran biasanya dimulai dengan kreditur yang memiliki jaminan atau hak tanggungan, diikuti oleh kreditur preferen seperti pekerja yang berhak atas upah yang belum dibayar, dan terakhir kreditur konkuren.

Dalam konteks kepailitan, notaris memiliki peran yang penting terutama dalam hal pengesahan dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan likuidasi dan pembubaran perusahaan. Notaris memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dalam proses ini sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, notaris dapat terlibat dalam penyusunan dan pengesahan akta perjanjian antara perusahaan dan kreditur, akta penjualan aset, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang diperlukan dalam proses likuidasi. Notaris juga berperan dalam melindungi hak-hak pekerja selama proses kepailitan. Dalam beberapa kasus, notaris dapat memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap pekerja, seperti pembayaran upah dan pesangon, diprioritaskan dalam distribusi aset perusahaan yang dilikuidasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja, yang sering kali berada dalam posisi yang rentan, mendapatkan hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, peran notaris dalam kepailitan adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, notaris membantu menjaga integritas sistem hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Notaris juga berperan dalam melindungi hak-hak pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal perusahaan mengalami pembubaran, hak-hak pekerja seperti upah yang belum dibayar, pesangon, dan uang penghargaan masa kerja harus diprioritaskan. Notaris dapat memastikan bahwa hak-hak ini dicantumkan secara jelas dalam akta pembubaran dan dokumen terkait lainnya. Lebih jauh, notaris dapat berkoordinasi dengan kurator dalam proses kepailitan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi sebelum distribusi aset kepada kreditur lain. Ini melibatkan verifikasi terhadap klaim pekerja dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Keberadaan notaris dalam transaksi hukum memberikan jaminan legalitas dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Notaris berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar dan bahwa dokumen yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini sangat penting dalam konteks pembubaran perusahaan, di mana banyak pihak yang terlibat dan berbagai hak serta kewajiban yang harus diselesaikan. Notaris juga berperan dalam mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan dengan memastikan bahwa semua dokumen dibuat secara akurat dan transparan. Dalam situasi kepailitan, peran notaris menjadi semakin penting karena melibatkan penanganan



aset yang signifikan dan kepentingan banyak pihak. Notaris harus memastikan bahwa proses likuidasi dan distribusi aset dilakukan secara adil dan transparan, sehingga mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi. Sering terjadi kasus sengketa pesangon antara pekerja dan perusahaan teknologi yang bangkrut. Pekerja merasa tidak mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris berperan sebagai mediator, mengumpulkan semua bukti dan melakukan perhitungan ulang berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pengadilan untuk memastikan semua sengketa diselesaikan secara adil.

Melalui analisis mendalam, penelitian ini mengungkap bagaimana notaris dapat memainkan peran yang lebih aktif dan preventif, tidak hanya sebagai pelaksana administratif tetapi sebagai pembela hak pekerja. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pandangan baru tentang bagaimana peraturan dan undang-undang saat ini diterapkan dalam praktek, dan apa saja kekurangan serta celah yang mungkin ada. Penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk perubahan atau peningkatan kebijakan yang dapat lebih memastikan bahwa hak pekerja tidak terabaikan dalam proses yang sering kali didominasi oleh kepentingan finansial dan korporasi. Dengan memberikan analisis hukum, penelitian ini juga mendukung usaha-usaha legislatif dan reformasi hukum untuk menyempurnakan kerangka kerja yang mengatur pembubaran perusahaan dan perlindungan hak pekerja di Indonesia. Hal ini akan sangat berarti dalam upaya peningkatan keadilan sosial dan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengkajian dilakukan dengan dua rumusan masalah, yaitu pertama, apakah peran Notaris dalam pembubaran Perseroan Terbatas yang Kepailitannya berakhir?; kedua, bagaimana perlindungan hak pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit?

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis dan penilaian terhadap peraturan hukum dan norma-norma yang mengatur peran notaris dalam proses pembubaran perusahaan dan sifat penelitian dalam menggunakan penelitian hukum *Perskriptif (descriptive legal study)*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada dan terjadi dimasyarakat.¹

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomo 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK); dan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal dan bahan literatur lainnya yang berkaitan. Penulis menggunakan Teknik penulisan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai

¹ Djoni Sumardi Gozali. 2021. Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm. 109.



keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Pembubaran Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses Pembubaran perusahaan. Tugas dan tanggung jawab notaris dalam situasi ini tidak hanya terbatas pada aspek formalitas hukum, tetapi juga mencakup perlindungan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks kepailitan, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan proses pembubaran perusahaan disusun dengan benar dan sah menurut hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris harus bertindak independen dan tidak memihak, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu peran utama notaris dalam kepailitan adalah pembuatan akta pembubaran perusahaan. Akta ini merupakan dokumen penting yang menandai secara resmi pembubaran sebuah perusahaan. Notaris harus memastikan bahwa akta tersebut memuat semua informasi yang diperlukan, termasuk keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Akta pembubaran perusahaan merupakan dokumen hukum yang penting dalam proses pengakhiran kegiatan usaha atau perusahaan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti formal yang menunjukkan bahwa perusahaan telah resmi dibubarkan dan tidak lagi menjalankan operasionalnya. Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa keputusan yang menyatakan pembubaran perusahaan sudah sah dan tervalidasi secara hukum, serta untuk menjamin bahwa dokumen akta pembubaran tersebut memberikan bukti yang jelas dan tepat waktu tentang akhir dari eksistensi hukum perusahaan yang dibubarkan. Akta pembubaran perusahaan berkaitan dengan mencatat keputusan resmi untuk membubarkan perusahaan. Keputusan ini merupakan langkah krusial dalam proses hukum untuk mengakhiri kegiatan operasional dan eksistensi hukum perusahaan tersebut. Akta pembubaran harus dengan jelas mencantumkan bagaimana keputusan ini diambil dan oleh siapa. Pencatatan yang akurat dan tepat dari keputusan pembubaran dalam akta oleh notaris adalah penting karena memberikan bukti hukum yang diperlukan tentang permulaan dari proses pembubaran perusahaan. Hal ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor, karyawan, dan pihak terkait lainnya, memiliki akses yang jelas dan transparan terhadap informasi mengenai pembubaran perusahaan dan langkah-langkah yang diambil dalam proses hukum ini. Dengan demikian, akta pembubaran perusahaan yang disahkan oleh notaris berfungsi sebagai dokumen hukum penting yang mengikat yang mencatat dengan tegas keputusan untuk mengakhiri eksistensi hukum perusahaan yang sedang dibubarkan.

Dalam proses pembubaran perusahaan, notaris juga memiliki peran penting dalam mengelola utang dan piutang untuk memastikan semua kewajiban dan hak perusahaan diselesaikan dengan benar dan adil. Pertama, notaris melakukan verifikasi terhadap seluruh utang dan piutang perusahaan. Proses ini melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti kontrak, faktur, dan laporan keuangan, serta memeriksa legalitasnya. Notaris membuat daftar semua utang, termasuk utang kepada kreditor, pajak yang belum dibayar, dan kewajiban lainnya, serta daftar piutang yang harus diterima perusahaan dari pelanggan atau mitra bisnis. Peran ini didasarkan pada berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun



2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik dan tugas-tugas lainnya, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjelaskan prosedur kepailitan dan peran kurator serta notaris dalam penyelesaian utang perusahaan yang dinyatakan pailit. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hak dan kewajiban dalam kontrak, utang-piutang, serta ketentuan tentang pembayaran utang.

Notaris memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa semua kewajiban ini dipenuhi secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi verifikasi terhadap catatan pembayaran gaji, perhitungan pesangon, dan evaluasi terhadap kewajiban lain yang harus dibayar kepada karyawan. Proses ini sering kali melibatkan kolaborasi dengan departemen sumber daya manusia perusahaan dan advokat yang berspesialisasi dalam hukum ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa setiap karyawan menerima hak-hak mereka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi antara perusahaan yang mengalami pembubaran, karyawan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini termasuk memberikan konsultasi hukum kepada karyawan yang membutuhkan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam situasi pembubaran. Dengan memprioritaskan kewajiban ini, notaris memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak karyawan dihormati dan bahwa proses pembubaran perusahaan berjalan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur yang memiliki jaminan, diberitahu secara jelas tentang proses eksekusi tersebut. Hal ini termasuk pengumuman publik dan komunikasi yang transparan untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan integritas hukum yang tinggi. Dengan demikian, peran notaris dalam penanganan utang yang dijamin ini adalah untuk memfasilitasi proses yang adil dan transparan, yang tidak hanya memenuhi hak-hak kreditur yang memiliki jaminan, tetapi juga melindungi kepentingan perusahaan yang mengalami pembubaran serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Perlindungan Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 156, mengatur tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam situasi kepailitan, kewajiban ini tetap harus dipenuhi oleh perusahaan, meskipun perusahaan tersebut berada dalam kondisi finansial yang sulit.² Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi selama proses pembubaran perusahaan. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris harus memastikan bahwa semua prosedur hukum dijalankan dengan benar dan bahwa hak-hak pekerja dihormati.

Dalam proses pembubaran perusahaan yang pailit, notaris harus memastikan bahwa semua kewajiban perusahaan terhadap pekerja dipenuhi sebelum

² Santoso, M Agus. 2012. *Hukum Moral Dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. hlm. 51



menyelesaikan akta pembubaran.³ Notaris juga dapat membantu memediasi negosiasi antara manajemen perusahaan dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang adil. Dalam kasus perusahaan yang mengalami kepailitan mekanisme hukum untuk perlindungan hak pekerja diterapkan dengan berbagai tantangan. Meskipun undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan lainnya memberikan perlindungan yang jelas, pelaksanaannya menghadapi hambatan karena keterbatasan finansial perusahaan. Notaris yang terlibat dalam proses pembubaran perusahaan berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi. Notaris membantu memediasi negosiasi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi yang adil. Selain itu, notaris memastikan bahwa semua prosedur hukum dijalankan dengan benar, termasuk pelaporan kepada instansi terkait dan pengumuman publik tentang pembubaran Perusahaan.⁴

Beberapa hak pekerja yang dapat diperhatikan perlindungannya oleh Notaris yaitu, Pertama, Perlindungan hak-hak pekerja oleh notaris dalam situasi pembubaran perusahaan adalah hak pekerja atas informasi yang jelas dan komprehensif mengenai proses pembubaran tersebut. Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pekerja diberikan akses terhadap informasi yang tepat waktu dan akurat mengenai alasan serta prosedur yang akan dilakukan dalam pembubaran perusahaan. Hal ini termasuk memberikan pemahaman kepada pekerja mengenai dampak hukum dan sosial dari pembubaran perusahaan terhadap status pekerjaan mereka, termasuk kapan perusahaan akan menghentikan operasionalnya dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi mereka secara individual. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan hak-hak yang dimiliki pekerja selama proses pembubaran, seperti hak untuk mendapatkan kompensasi atau tunjangan yang masih harus dibayarkan, serta prosedur klaim yang dapat mereka lakukan; kedua, Hak untuk diaudit, Notaris dapat memfasilitasi hak pekerja untuk melakukan audit atau peninjauan atas keuangan perusahaan yang mengalami pembubaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa karyawan memperoleh informasi yang akurat mengenai situasi keuangan perusahaan dan hak mereka terkait dengan klaim atas utang perusahaan; ketiga, Hak untuk Mengajukan Klaim, Notaris membantu pekerja dalam mengajukan klaim mereka terhadap perusahaan yang dibubarkan. Ini termasuk klaim terhadap gaji yang belum dibayar, tunjangan yang masih harus diterima, atau kompensasi lainnya yang dijamin oleh undang-undang atau perjanjian kerja; keempat, Hak atas Perlakuan yang adil, Notaris memastikan bahwa semua pekerja diperlakukan dengan adil dan setara dalam proses pembubaran perusahaan. Ini termasuk memastikan bahwa proses pemilihan karyawan yang akan diberhentikan (jika ada) dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku; kelima, Hak atas kompensasi, Notaris berperan dalam memastikan bahwa karyawan menerima kompensasi yang sesuai dengan hak mereka dalam kasus pembubaran perusahaan. Ini meliputi penyelesaian hak-hak mereka terkait dengan pesangon, uang penggantian, atau manfaat lain yang dijamin dalam perjanjian kerja atau oleh undang-undang ketenagakerjaan; keenam, Hak atas Privasi dan keamanan Informasi, Notaris memastikan bahwa informasi pribadi dan keuangan pekerja yang terlibat dalam proses pembubaran perusahaan dijaga

³ Victor dan Soekarso.1994.Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.Jakarta:Rineka Cipta.hlm.45.

⁴ Suhrawardi K. Lubis.2008.Etika Profesi Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.hlm.09.



kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Ini termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi atau informasi keuangan yang dapat merugikan pekerja.

Dengan memastikan pelaksanaan hak-hak ini, notaris berperan penting dalam memastikan bahwa pekerja yang terkena dampak pembubaran perusahaan mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui perannya sebagai penjaga integritas proses hukum, notaris membantu melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti pembubaran perusahaan. Peran notaris dalam proses kepailitan perusahaan tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan legal formalitas, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Notaris berfungsi sebagai pengawas independen yang bertugas memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pekerja yang sering kali berada dalam posisi rentan saat perusahaan mengalami kepailitan.

Simpulan

Peran notaris dalam proses pembubaran perusahaan, terutama dalam kasus kepailitan adalah memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan pembubaran disusun dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, notaris juga memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi, dengan memfasilitasi negosiasi antara manajemen perusahaan dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai kompensasi dan kewajiban lainnya.

Dalam proses pembubaran perusahaan yang pailit, notaris harus memastikan bahwa semua kewajiban perusahaan terhadap pekerja dipenuhi sebelum menyelesaikan akta pembubaran. Sehingga bentuk perlindungan hak pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk diaudit atau peninjauan kembali atas keuangan perusahaan yang mengalami pembubaran, hak untuk mengajukan klaim (gaji, tunjangan, kompensasi), hak atas perlakuan yang adil, dan hak atas privasi dan keamanan informasi.

Saran

Dalam rangka menghadapi situasi kepailitan perusahaan yang semakin kompleks, untuk meningkatkan perlindungan hak pekerja dan efektivitas peran notaris dalam proses pembubarannya, maka Pemerintah perlu mempertimbangkan reformasi hukum yang lebih luas untuk memperkuat perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam undang-undang kepailitan dan ketentuan yang lebih jelas tentang kewajiban perusahaan terkait dengan pembayaran gaji dan pesangon. Notaris dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi atau badan hukum lainnya untuk mengembangkan panduan praktik terbaik yang mengatur tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembubaran perusahaan. Panduan ini dapat menjadi pedoman yang berguna bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang ada untuk menangani perselisihan antara pekerja dan perusahaan dalam konteks kepailitan. Hal ini dapat mencakup pembentukan badan arbitrase atau lembaga mediasi yang khusus menangani sengketa buruh.

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, serta bimbingan dan kehendak-Nya, hingga pada akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Dengan rasa tulus dan hormat serta kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada Orang Tua terkasih serta segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama mengikuti pendidikan dan selesainya penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal.2019."Kebijakan Publik dan Pembubaran Perusahaan: Studi Kasus di Indonesia," Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik 6, no. 1
- B,Setiawan.2017.Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Kontrak Kerja.Yogyakarta:PT RajaGrafindo Persada
- D,Alfian.2018.Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dew,Dian.2021. "Rekonstruksi Hukum Pembubaran Perusahaan di Indonesia".Jurnal Rekonstruksi Hukum
- Dewi,dkk.2019. "Perlindungan hukum pekerja dalam pembubaran perusahaan". Jurnal Pembaharuan Hukum 6, no 2
- Gozali,Djoni Sumardi. 2021.Illmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta:Ull Press Yogyakarta
- H,Suharsono.2020.Perusahaan dan Perseroan Terbatas: Panduan Lengkap Pendirian, Pengurusan, dan Pembubarannya.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Haryono,S.2018. "Kepailitan perusahaan dan implikasinya terhadap hak pekerja".Jurnal Hukum Bisnis 5, no.2.
- Kartika,Gita.2021."Dampak Psikologis Pembubaran Perusahaan pada Karyawan," Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi
- Maesaroh,Hana.2020."Pengaruh Hukum Pembubaran Perusahaan Terhadap Hak-Hak Pekerja," Jurnal Hukum Pekerjaan 8, no. 3
- Nugraha,Bima Arya.2018."Efek Pembubaran Perusahaan Terhadap Pasar Kerja Lokal".Jurnal Sosial Ekonomi Kerja 12
- Priyanto.2017.H.Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Peraturan Perundang-Undangan dan Praktik Pengadilan.Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Putri,Karina.2022. "Strategi Bisnis dalam Menghadapi Risiko Pembubaran Perusahaan",Jurnal Strategi Bisnis 6
- Raharjo.2019. Pailit dalam Hukum Perseroan: Tinjauan dari Segi Hukum Perusahaan dan Hukum Kepailitan.Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo
- Rahmawati,Cynthia.2020."Analisis Pengaruh Kepailitan Perusahaan terhadap Lingkungan Bisnis".Jurnal Bisnis dan Lingkungan 4.
- S,Soesilo.2016.Aspek Hukum Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Jakarta:PT Rineka Cipta
- Santoso, W.2019.Hukum Perseroan Terbatas: Perspektif Pemegang Saham, Manajemen, dan Karyawan.Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Susilo,Joko.2021. "Pembubaran Perusahaan dan Dampaknya terhadap Kreditur," Jurnal Hukum dan Kredit 9
- Setiawan, S.2021. "Kajian Hukum tentang Perlindungan Pekerja dalam Pembubaran Perusahaan Karena Pailit." Jurnal Hukum dan Keadilan



- Thamrin, Utama. 2019. "Peranan Mediator dalam Penyelesaian Konflik Pembubaran Perusahaan," Jurnal Mediasi 9
- Wulandari, V. 2019. "Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan pada saat pembubaran. Jurnal Hukum dan Keadilan". Jurnal Hukum dan Keadilan